

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH

(Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat)

Oleh:

Wildan Dwi Dermawan

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis

Jl. R.E. Martadinata No. 150, Ciamis 46274 Jawa Barat

Email: wildandwidermawan@yahoo.com

ABSTRAK

Sejak dilaksanakan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 diharapkan pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan di pusat. Tujuan otonomi daerah antara lain menciptakan kemandirian, pendelegasian wewenang, menggali potensi sumber-sumber daya Pemerintah Daerah agar mapan secara keuangan. Namun, tidak semua Pemerintah Daerah mapan secara keuangan. Melihat beberapa fenomena menunjukkan bahwa kinerja keuangan setiap Pemerintah Daerah berbeda. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan asli daerah tetapi tidak diikuti oleh peningkatan belanja daerahnya. Berdasarkan fenomena di atas terdapat masalah berupa kesenjangan keuangan antar daerah yang berakibat pada kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah studi kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2014 -2016. Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2014 sampai 2016 yang terdiri dari 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah belanja daerah. Pengujian hipotesis menggunakan uji t (T-Test). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah

PENDAHULUAN

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Sejak dilaksanakan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 diharapkan pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan di pusat. Tujuan otonomi daerah antara lain menciptakan kemandirian, pendelegasian wewenang, menggali potensi sumber-sumber daya Pemerintah Daerah agar mapan secara keuangan.

Fenomena yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat menggambarkan tidak semua Pemerintah Daerah mapan secara keuangan. Ini terlihat dari data pertumbuhan belanja daerah yang merupakan salah satu indikator dari kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan adanya perbedaan pertumbuhan belanja daerah yang tidak merata.

Fenomena selanjutnya, yaitu terlihat bahwa adanya peningkatan pendapatan asli

daerah tetapi tidak diikuti oleh peningkatan belanja daerahnya. Berdasarkan fenomena di atas terdapat masalah berupa kemampuan keuangan pemerintah daerah yang tidak merata dalam mengalokasikan belanja daerahnya, sebagian daerah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan sebagian lagi menunjukkan tingkat pertumbuhan yang sangat rendah. Perbedaan yang signifikan dari pertumbuhan belanja daerah untuk Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat menunjukkan telah terjadi kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah yang pada akhirnya akan menimbulkan kesenjangan kesejahteraan antar daerah.

Berdasarkan masalah tersebut perlu adanya pembenahan. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk hidup sejahtera. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaannya dari sektor pendapatan asli daerah agar mampu membiayai pengeluaran daerahnya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar-pemerintahan dan menjamin tercapainya

standar pelayanan publik minimum diseluruh daerah dengan adanya transfer dana ini bagi Pemda merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri (Halim, 2008).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prakosa (2004) yang meneliti di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraeni (2014) di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang signifikan untuk prediksi Anggaran Belanja Daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2009). Indikator pendapatan asli daerah ini adalah jumlah pajak daerah + retribusi daerah + hasil perusahaan milik daerah + hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Belanja Daerah (Y)

Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU Nomor 33 Tahun 2004). Indikator belanja daerah terdiri dari jumlah belanja langsung + belanja tidak langsung.

Populasi

Populasi penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2014 sampai 2016 yang terdiri dari 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumen yang dimaksud disini adalah dokumen berupa laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun

2014-2016 yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat tentang Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2014-2016.

Metode Analisis Data

Analisis statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier sederhana dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Uji Asumsi Klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan peneliti yang uji hipotesis secara parsial (*t-test*) dan uji koefisien determinasi (R^2).

Uji hipotesis secara parsial (Uji t)

Uji t (*t-test*) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen, ini dapat dilihat melalui nilai koefisien determinasi (r^2). Perhitungan koefisien determinasi memiliki tujuan untuk mengetahui besar kecilnya kontribusi dari variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Data yang disajikan dalam penelitian ini berbentuk Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2014-2016. Jumlah Populasi sebanyak 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode

tahun 2014 – 2016. Dari hasil tersebut terlihat Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014 – 2016 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebesar 143,88 miliar. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 55,66% menjadi 223,96 miliar dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali dari tahun sebelumnya sebesar 4,21% menjadi 233,40 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam menghimpun sumber-sumber dana setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Perkembangan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode tahun 2014 – 2016 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2014 Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebesar 1394,54 miliar. Pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 91,11% menjadi 123,92 miliar dan pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali dari tahun sebelumnya sebesar 25,49% menjadi 92,33 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan prasarana dan sarana ekonomi di Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan setiap tahunnya.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan hasil pengolahan data maka dapat dibentuk model prediksi variabel sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja manajerial sebagai berikut:

$$Y = -480,056 + 1,024X$$

1. Konstanta sebesar -480,056 menyatakan bahwa ketika Pendapatan Asli Daerah bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka Belanja Daerah akan bernilai sebesar -480,056 miliar.
2. Nilai variabel X yaitu Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,227, artinya ketika Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 1,227 miliar.

Uji hipotesis secara parsial (Uji t)

1. Pengujian hipotesis X

Berdasarkan tabel nilai t_{hitung} yang diperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sebesar 4,028. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan $\alpha=0,05$, $df=n-k-1=78-3-1=74$, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t_{tabel} sebesar $\pm 1,993$. Dari nilai-nilai tersebut terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh sebesar 4,028, berada diluar nilai t_{tabel} (-1,993 dan 1,993). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil perhitungan besarnya nilai koefisien korelasi atau (R) yang diperoleh sebesar 0,734. Maka, koefisien determinasi (Kd) dapat dihitung sebagai berikut:

$$Kd = (r)^2 \times 100 \%$$

$$Kd = (0,734)^2 \times 100 \%$$

$$Kd = 53,9\%$$

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai koefisien korelasi atau (R) yang diperoleh sebesar 0,734. Dengan demikian koefisien determinasi dapat dihitung sebagai berikut:

$$Kd = (r)^2 \times 100 \%$$

$$Kd = (0,734)^2 \times 100 \%$$

$$Kd = 53,9\%$$

Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa nilai koefisien determinasi simultan yang diperoleh sebesar 53,9%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi terhadap belanja daerah sebesar 53,9%, sedangkan sisanya sebesar 46,1% merupakan kontribusi dari faktor lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah secara signifikan ini berarti bahwa semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin meningkat pula Belanja Daerahnya. Berdasarkan hasil persamaan regresi, konstanta pada persamaan regresi tersebut bernilai negatif. Ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah menjadi biaya yang tetap harus dibayar oleh Pemerintah setiap waktunya sehingga terjadinya defisit secara terus-menerus yang akhirnya Pemerintah memperbesar utang luar negeri untuk membiayai belanja daerah yang merupakan biaya rutin.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah pada tahun 2014-2016 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis memberikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan:

1. Diharapkan Pemerintah Daerah melakukan tindakan-tindakan serta upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal agar tingkat kemandirian di Provinsi Jawa Barat semakin tinggi sehingga tidak bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat.
2. Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebaiknya meningkatkan Penerimaan Daerahnya tidak hanya Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan penerimaan ini dengan cara meningkatkan jenis penerimaan Pemerintah Daerah Jawa Barat berupa Lain-lain Pendapatan yang Sah sehingga tujuan otonomi Daerah di Provinsi Jawa Barat dapat terlaksana dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Damayanti. 2008. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugraeni. 2014. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah. *Akmenika UPY, Vol 8, Hal 96-117*.
- Prakosa, Kesit Bambang, 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY), *JAAI, Volume 8 Nomor 2. Hal. 34-47*.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah

Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126).